

## **SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM IRAN: Antara Wilayatul Faqih dan Teo-Demokrasi**

**Wahyu Hidayat**

STIT Daarul Fatah Tangerang  
wahyusadrainstitute@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Wilayatul Faqih is the national political identity of the Islamic Republic of Iran's government system which has always been a major topic and issue in the study of Middle Eastern politics today. Modern political thinkers have discussed the issue of wilayatul faqih in political literature under the shadow of the rapid development of the new era (post-millennial era) political order. Related to the existence of the wilayatul faqih system adopted by the Islamic Republic of Iran, especially its revolutionary aspects which then caused various dynamics within it such as: the vulnerability of the national economy of the Islamic Republic of Iran to anti-Iran sanctions by the West, the Iranian nuclear issue and the emergence of the idea of a second wave of the Iranian Islamic revolution as an effect of the emergence of various kinds of social and political turmoil that occurred in Iran today. Therefore, one way to understand the problems in Iran today is to examine the discourse of effective political-intellectual currents in the current political-social dynamics of Iranian society. Reading the Islamist current as one of the main currents that has become the hegemonic force of the Iranian Islamic Revolution so far which gave birth to the concept of wilayatul faqih can open a proper foundation for understanding the study of the sustainability of the current Iranian Islamic Revolution.*

**Keywords:** *The Islamic Republic of Iran; Wilayatul Faqih; Ali Khamenei; Theo-Democracy.*

### **ABSTRAK**

Wilayatul Faqih merupakan identitas politik nasional sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang selalu menjadi bahan dan isu utama dalam kajian politik Timur-Tengah saat ini. Para pemikir politik modern banyak berbicara tentang masalah *wilayatul faqih* dalam literatur politik di bawah bayang-bayang perkembangan tatanan politik pesat era baru (*post-milenial era*). Terkait dengan eksistensi sistem *Wilayatul Faqih* yang dianut oleh Republik Islam Iran, khususnya aspek revolusionernya yang kemudian menyebabkan berbagai dinamika didalamnya seperti: rentannya perekonomian nasional republik Islam Iran terhadap sanksi anti-Iran oleh Barat, isu nuklir Iran serta munculnya gagasan gelombang kedua revolusi Islam Iran sebagai efek dari munculnya berbagai macam gejolak sosial dan politik yang terjadi di Iran saat ini. Oleh karena itu salah satu cara untuk memahami masalah di Iran saat ini adalah dengan mengkaji wacana arus politik-intelektual yang efektif dalam suasana dinamika politik-sosial masyarakat Iran yang terjadi saat ini. Pembacaan arus Islamis sebagai salah satu arus utama yang menjadi kekuatan hegemonik Revolusi Islam Iran selama ini yang melahirkan konsep *wilayatul faqih* dapat membuka landasan yang layak untuk memahami kajian keberlangsungan Revolusi Islam Iran saat ini.

**Kata Kunci:** Republik Islam Iran; Wilayatul Faqih; Ali Khamenei; Teo-Demokrasi.

## PENDAHULUAN

Peristiwa Revolusi Islam Iran yang terjadi pada tanggal 11 Februari 1979 telah menghentak tatanan politik global. Polarisasi yang kemudian terjadi adalah munculnya Islam sebagai kekuatan baru sekaligus penyeimbang kekuatan politik Barat, dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutunya. Revolusi Islam Iran yang telah menjadi fenomena paling spektakuler di abad ke 21, kini usianya yang menanjak 46 tahun tetap eksis serta menunjukkan penegasan kembali posisi agama ke dalam dinamika kehidupan sosial-kemasyarakatan terutama politik dan tidaklah mengherankan apabila wacana tentang keberhasilan Revolusi Islam Iran sampai saat ini masih menjadi topik yang selalu hangat untuk dikaji.

Salah seorang pakar politik Timur Tengah *Richard Cottom*, mengemukakan bahwasanya Revolusi Islam Iran sebagai, “*One of the greatest populist explosions in human history*” dimana keberhasilannya mempesonakan dunia Islam di satu sisi, namun di sisi lain menggemparkan rezim pemerintahan muslim lainnya yang cenderung korup dan otoriter saat itu.<sup>1</sup> Revolusi Islam Iran memberikan pelajaran kepada umat Islam se-dunia, untuk membangkitkan dan mengembalikan kepercayaan diri mereka dalam agama, sehingga mereka dapat lagi memimpin dunia dan menepatkan dunia di bawah naungan peradaban Islam yang mulia.<sup>2</sup> Revolusi tersebut menjadi pengingat bahwa Islam merupakan jalan hidup yang komprehensif yang mengatur tata-cara ibadah dan masyarakat.

Buah dari Revolusi Islam Iran sampai saat ini terbukti ampuh di dalam memberikan solusi atas kritis multidimensi yang dialami masyarakat Iran secara keseluruhan. Tentu saja pada awalnya, bukan tanpa hambatan Imam Khomeini menawarkan gagasan sistem pemerintahan seperti itu. Banyak kritikan dan ketidak-

---

<sup>1</sup> Richard Cottam, “Inside Revolutionary Iran”, dalam *Iran’s Revolution: The Search for Consensus*, editor : R.K Ramazani ( Bloomington : Indiana University Press, 1990 ), h.3.

<sup>2</sup> Jhon L. Esposito, *Ancaman Islam : Mitos atau Realitas* (terj), (Bandung : Mizan 1996), h.30.

setujuan gagasan tersebut yang datang dari berbagai kalangan masyarakat Iran, mulai dari masyarakat biasa hingga sesama kaum rohaniawan sendiri. Kritik keras tentu saja datang dari kalangan yang anti terhadap konsep *Wilayatul Faqih*, yakni yang disebut sebagai kelompok royalis, yaitu, orang terdekat dari rezim Syah Pahlevi (1925-1978), mereka bertujuan mencita-citakan kembali berdirinya sistem monarki di Iran. Hingga kini mereka masih aktif mengagendakan dan memperjuangkan cita-cita mereka tersebut di luar negeri melalui media televisi dan surat kabar asing.<sup>3</sup> Sementara kritik di kalangan ulama sendiri terkait pada pemberian kewenangan kekuasaan pemerintahan yang terlalu besar kepada seorang faqih. Sulitnya mencari kriteria seorang *Wilayatul Faqih* yang ideal dan minimnya partisipasi rakyat didalam proses pengambilan kebijakan yang dianggap penting bagi mereka. Diantara ulama yang mengkritik Imam Khomeini adalah Ayatullah Ali Montazeri, seorang *Marja ' Taqlid* yang hingga kini masih hidup di kota Qom, Iran.<sup>4</sup>

Namun berbagai kritik tersebut tidak serta-merta membuat surut pula minat dan dukungan masyarakat Iran terhadap gagasan *wilayatul faqih* Imam Khomeini tersebut. Demikian halnya dengan berbagai ancaman dan embargo yang dilakukan pihak Barat, justru semakin memperkuat identitas Republik Islam Iran. Dengan demikian, penelitian ini berpretensi untuk menjawab pertanyaan, seperti apa reaktualisasi penerapan *wilayatul faqih* saat ini, sebelum dan sesudah revolusi? Lalu tak kalah pentingnya, pertanyaan perihal mengapa serta bagaimana gagasan ini dari sudut pandang pemimpin spiritual penjaga Revolusi Islam Iran Seyyed Ali Khamenei?

## METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rangkaian pertanyaan dan kegelisahan di atas, maka metode penelitian tepat untuk digunakan adalah kualitatif-kepustakaan yang dilakukan secara deskriptif dan analitis terhadap berbagai teks yang relevan dengan tema penelitian. Agar temuan penelitian yang dihasilkan tidak bias, maka referensi yang digunakan oleh penulis diambil dari sumber-sumber primer yang berasal dari kalangan masyarakat Iran sendiri, dan tentu saja dari hasil penelitian lainnya yang serupa. Hal ini penting untuk dilakukan

---

<sup>3</sup> Lihat situs mereka [www.apstateislam.com](http://www.apstateislam.com).

<sup>4</sup> Lihat, Riza Sihbudi, *Otobiografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta : Gramedia 1996),h. 142.

dalam rangka mengetahui secara persis hakikat dari sistem pemerintahan Islam Iran (sebagai negara modern berbasis teokrasi Islam) sekaligus juga tantangan penerapan wilayatul faqihnya dari kacamata subyek atau pelakunya sendiri. Dari sini kemudian dapat dilihat kunci “keberhasilan” sistem Republik Islam Iran sampai hari ini dalam mempertahankan identitasnya sebagai sebuah bangsa sehingga bisa terus mengalami kemajuan meskipun mengalami berbagai kritik hingga tekanan, baik eksternal maupun internal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Wilayatul Faqih di Tangan Khomeini hingga Khamenei

Dalam pandangan masyarakat Iran saat ini, Islam bukan saja agama yang mengurus persoalan peribadatan dan moralitas, namun juga merupakan sebuah sistem yang kompleks meliputi pendidikan, pemerintahan dan politik hingga organisasi ekonomi dan sosial.<sup>5</sup> Sistem kenegaraan yang dianut Republik Islam Iran ini bermula dari revolusi 1979 yang digerakkan oleh seorang *Mullah*<sup>6</sup> dari *Khomein*<sup>7</sup> yang berlangsung tidak kurang dari 15 tahun dalam perjuangannya, dan pada akhirnya membawa sebuah harapan dan pencerahan bagi masyarakat Iran serta memberikan formula baru terhadap sistem dan konsep pemerintahan Republik Islam Iran yang dikenal dengan sebutan *Wilayatul Faqih* dan pemerintahan Islam (*Velayat-e-Faqih va Hukumat-e-Islami*)<sup>7,8</sup>

---

<sup>5</sup> Konsep ini sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan para tokoh politik Islam sendiri. Dan kemudian terfragmentasi dalam tiga penafsiran yang berbeda mengenai hubungan agama dan negara. Aliran pertama berpendirian seperti diatas, yakni bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan. Aliran kedua pendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan sama sekali. Sedangkan aliran ketiga berpendirian dan menolak pendapat diantara kedua aliran sebelumnya, namun Islam sebagai agama hanya memiliki seperangkat tata-nilai etika bagi kehidupan bernegara. Lihat, Munawwir Sjazali, *Islam dan tata Negara*, (Jakarta: UI Press 1993), h.2.

<sup>6</sup> *Mullah* adalah gelar yang diasosiasikan kepada seorang ruhaniawan muslim yang memiliki kharisma dan keilmuan yang tinggi. Lihat, Ghulam Husain Sadry (ed), *Farhang Farsi Imruz*, (Teheran: Kalame Publisher 2000), h.738.

<sup>7</sup> *Khomein* adalah nama sebuah dusun yang terletak dikawasan Iran bagian tengah. Dibutuhkan waktu kira-kira 3 jam dari Ibukota Teheran untuk sampai disana. Daerahnya dipenuhi dengan pegunungan bebatuan (sahara) dan di sepanjang jalannya banyak tanaman bunga mawar merah. Untuk lebih jelasnya lihat, Kedubes Iran di Jakarta, *Republik Islam Iran Selayang Pandang*, (Jakarta: Humas Kedubes RII di Jakarta, tt), h.17.

<sup>8</sup> Konsep ini merupakan gagasan monumental Imam Khomeini dalam sistem pemerintahan Islam model Iran pasca tumbang rezim Syah Pahlevi (1925-1978) serta dijadikan sebagai *Blue Print* pola

Ayatullah Khomeini adalah ulama Islam kontemporer yang mengembangkan dan mempraktekan gagasan pemerintahan Islamnya di dunia modern. Beliau merupakan sebuah kekuatan atas semangat puritanisme Islam di tengah-tengah dekadensi moral, korupsi dan hegemoni Barat di dunia muslim masa kini. Sebagai negarawan, beliau terikat oleh syariat dan kearifan politik masanya. Lewat visi keagamaan-nya yang reaktif, Imam Khomeini mempercayakan dan memperdayakan institusional Islam model Iran melalui institusi inilah yang kemudian membuat Republik Islam Iran tetap eksis berdiri sampai saat ini. Konsep pemerintahan yang ditinggalkannya bukanlah sekedar pemanis demokrasi, lebih dari itu melainkan mencoba menunjukkan bahwasannya Islam sebagai agama mampu menjadi inspirasi sekaligus solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak terkecuali masalah pemerintahan. Revolusi Islam Iran yang merupakan perisai moral terhadap serangan gencar nilai-nilai Barat, kini merupakan jawaban bagi individu dan kelompok sosial yang mengalami prahara ketidakpastian, relativisme dan krisis identitas<sup>9</sup>. Maka dari itu, buah revolusi yang matang dan penuh dengan pertimbangan serta memiliki orientasi yang jelas akan menghasilkan sebuah perubahan yang substansial. Pengalaman di Iran menunjukkan bahwasannya revolusi sebagai salah satu cara untuk melakukan sebuah proses perubahan dan perbaikan ke masa depan, dan tentu saja agama tetap menjadi pijakan yang utama didalam memandu sebuah proses perubahan yang diharapkan.

Ketegasan sekaligus keyakinan Imam Khomenei dapat dilihat, antara lain, lewat kritik kerasnya terhadap model pemerintahan monarki yang dianut Arab Saudi dan negara-negara Emirat Arab lainnya. Khomenei memandang negara-negara tersebut tidak mencerminkan pemerintahan yang Islami, dan menyebut hubungan negara-negara tersebut dengan Amerika dalam berbagai bidang sebagai “Islam Amerika.” Mengutip pernyataannya sendiri,

Rezim yang berkuasa di Saudi Arabia mengenakan pakaian Muslim, tetapi sebenarnya pakaian itu mencerminkan kehidupan yang mewah, berlebihan dan tidak mempunyai rasa malu, merampok uang rakyat dan menyalahgunakan dan melakukan judi, mengadakan pesta pora dan minum-minum. Apakah akan mengejutkan jika orang mengikuti jalur

---

ketatanegaraan Republik Islam Iran *sekali* menjadi *Hand-Book* bagi para praktis politik dan ulama Iran saat ini. *Wiyatul Faqih* disini diartikan sebagai pendeliasian kekuasaan atau kewenangan politik di tangan kaum ulama (*Wali Faqih*) dalam bingkai sistem pemerintahan Islam. Lebih jauh lihat, Imam Khomeini, *Velayat-e-Faqih*, (Qum: Muassese-ye wa Asar-e Imam Khomeini 1999), h.5.

<sup>9</sup> Ali Rahnema (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan 1995),h.7.

revolusi, terpaksa melakukan tindakan kekerasan dan terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak dan sumber daya mereka.<sup>10</sup>

Kini setelah wafatnya Imam Khomeini, konsep *Wilayatul Faqih* model Iran terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Posisi pemimpin tertinggi spiritual dan komunal beralih kepada Sayyid Ali Khamenei. Sirkulasi kekuasaan yang berjalan mulus itu pada akhirnya membuat masyarakat Iran yakin, bahwasanya konsep *Wilayatul Faqih* merupakan sistem politik yang cukup mewakili bagi kesinambungan kehidupan bernegara Republik Islam Iran yang mereka cita-citakan. Namun sebagai pemimpin (*Rahbar*), beliau mempunyai karakteristik dan kharisma tersendiri di mata masyarakat Islam Iran saat ini. Berbeda dengan Ayatullah Khomeini, *Rahbar Seyyed* Ali Khamenei tidak mendapat sebutan sebagai *Imam*, melainkan sering disebut dan dikenal sebagai Pemimpin Revolusi Islam. Hal ini tampaknya untuk membedakan antara Imam Khomeini yang secara aklamasi dipilih oleh rakyat Iran secara langsung sedangkan Ali Khamenei dipilih oleh institusi politik yang dikenal dengan nama *Majelis-e Khubregon*.<sup>11</sup>

## B. Pemerintahan Islam Iran dan Wilayatul Faqih

Kewenangan *Faqih* dalam memimpin masyarakat dan mengatur masalah-masalah sosial pada setiap zaman adalah salah satu dari rukun mazhab *Itsna Asyariyah* yang benar dan berakar dari prinsip *Imamah* (kepemimpinan). Setiap orang tidak berdosa apabila tidak menyukai hak *Wilayatul Faqih* karena semata-mata ada argumen yang membuatnya menolak dan tidak menyakitinya. Namun ia tidak diperbolehkan menyebarkan isu dan wacana *Wilayatul Faqih* yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Pendapat *Wali Faqih* dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan pengaturan negara dan problem-problem yang sifatnya umum bagi kemaslahatan kaum muslimin haruslah diikuti. Sayyid Ali Khamenei meyakini bahwasanya menerima sepenuhnya segala bentuk

---

<sup>10</sup> Lebih jauh lihat, Jacob Goldberg, "The Shi'i Minority In Saudi Arabia," dalam Juan R.I. Cole dan Nikri R. Kaddie (ed), *Shiism and Social Protest* (New Heaven Conn: Yale University Press, 1986), h. 243.

<sup>11</sup> Majelis Khubregon adalah Sebuah lembaga yang terdiri dari para ahli senior dan alim ulama yang pada awal berdirinya pada bulan Agustus 1979 berjumlah 73 orang. Keberadaan lembaga ini di sahkan dalam Qanun Asasi Republik Islam Iran pasal 107 dan mempunyai tugas utama memilih, menasihati dan memberhentikan pemimpin spritual (*Rahbar*). Namun didalam konsep sunni lembaga ini di kenal dengan sebutan *Ahlul Hall Wal Aqdi*. Lebih jauh lihat, Iranian Embassy in Jakarta, *The constitution of The Islamic Republic of Iran*, (Taهران: Iran 1990), h. 69 bagian ke VIII.

perintah dan larangan dari *Wali Faqih* merupakan bukti keterkaitan pada Islam dan wilayah para Imam maksum (*al-wilayah al-aimmah*)<sup>12</sup>

*Wilayatul Faqih*, dalam hal ini pendegelasan kekuasaan para ulama atas umat, diberikan hak otoritas sebagai manifestasi *Ilahiyah* dimuka bumi. Keberadaannya menjadi pemicu aktivitas yang positif di dalam memandu kehidupan umat. Dalam konteks proses demokrasi yang berlangsung di Iran, sesungguhnya terjadi ketegangan pemaknaan antara kedaulatan rakyat *versus* kedaulatan Tuhan. Benturan makna antar keduanya menciptakan ruang perbuatan. Hegemoni *Wilayatul Faqih*, sebagaimana yang terdapat dalam sistem ketata-negaraan Republik Islam Iran menunjukkan bahwa kedaulatan Tuhan menggantikan kedaulatan sekuler. Konsekuensi dan implikasi dari semua itu tercermin dalam pendekatan konstitusional yang cenderung *rumit* yaitu adanya upaya mencampurkan nilai-nilai sistem teokrasi dengan nilai-nilai sistem demokrasi. Hingga terkadang pada tingkat tertentu terjadi ketegangan antara pendapat yang mendukung kedaulatan Ilahi dengan pendapat yang mendukung kedaulatan rakyat. Meskipun secara normative konstitusi menerima doktrin kedaulatan rakyat, namun hukum Tuhan yang direpresentasikan melalui *Wali Faqih* menempati posisi tertinggi dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran.<sup>13</sup>

Secara garis besar, struktur institusi politik Iran pasca revolusi terbagi dalam dua lembaga politik, yaitu lembaga politik yang lebih bernuansa *transendental* dan lembaga politik yang bernuansa *profan*. Dalam hal sistem dan etika politik yang cenderung berlaku di Iran, lembaga *transendental* tersebut lebih memiliki otoritas dibanding lembaga profan dalam menentukan kebijakan (*policy*) yang sifatnya umum bagi kemaslahatan negara dan masyarakat Iran, sementara pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif bertugas menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kewajiban tersebut. Namun di sisi lain pemerintah dan masyarakat Iran juga tidak dipaksakan untuk mengamini petunjuk dan perintah *Rahbar* serta melakukan kebijakan tersebut secara *absolute*. Mereka punya hak untuk tidak menyetujui atau bahkan tidak mengikuti kebijakan tersebut, karena memang konstitusi tidak memberikan sanksi ataupun hukuman bagi masyarakat yang tidak patuh tersebut. Pada dasarnya kebijakan *Wali Faqih* tersebut bersifat arahan dan masukkan

---

<sup>12</sup> Ali Khamenei, *Akar Keimanan* (terj), hal 40.

<sup>13</sup> Lihat, *UUD Republik Islam Iran*, (Jakarta: Humas Kedubes Iran, 2003), h.61.

(*tausifi*) bukan sifatnya memaksa apalagi mengikat. Tetapi dari segi *akhlaqi* dan doktrin teologi, kebijakan yang dibuat oleh *Wali Faqih* merupakan sebuah manifestasi hukum Tuhan yang sudah selayaknya diikuti dan diamankan karena implikasi dari kebijakan tersebut adalah demi kepentingan negara dan masyarakat itu sendiri.

Konsep *Wilayatul Faqih* di Iran secara aplikasi eksplisit ingin menegaskan eksistensi dan esensi kedaulatan Tuhan. Pemerintahan Republik Islam Iran dibina oleh kekuatan sakral, yaitu Tuhan. Hanya saja Tuhan tidak tampil secara langsung, melainkan direpresentasikan melalui para ulama. Mereka diyakini dapat memahami kehendak Tuhan yang tersirat dalam kitab suci Al Qur'an, dan yang lebih utama pemahaman mereka ini jauh dari hasrat kekuasaan sesaat dan kecurangan. Dengan demikian para *Mullah* dalam konsepsi keagamaan dan politik di Iran menjadi pengendali utama dari kebijakan negara. Meskipun demikian, kedaulatan dan hak-hak politik rakyat diakui dan dihormati, sebagaimana tercermin dengan adanya peran dan partisipasi masyarakat Iran melalui sistem pemilihan umum baik pada tingkat legislatif hingga pada pemilihan pemimpin tertinggi Iran (*Wali Faqih*).<sup>14</sup>

Posisi Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, memberikan kewenangan kepada beliau untuk membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Walaupun begitu kebijakan tersebut pada dasarnya dibuat atas dasar kesepakatan bersama diantara para ulama senior, tidak ada ruang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap sebuah kebijakan yang akan di terima oleh masyarakat secara keseluruhan, karena akan ada pertanggung jawaban moral dan kelambangan dari hasil sebuah kebijakan yang sedang dijalankan. Satu hal yang perlu disadari bahwasannya kebijakan tersebut harus berada diatas kepentingan Islam dan kesinambungan Revolusi Islam Iran. Maka tidak jarang pula, kebijakan yang diambil cenderung mengikuti kebijakan Imam Khomeini, yaitu *Wali Faqih* pemimpin spiritual sebelumnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Musthofa Abdul Rahman, *Iran Pasca Revolusi: Fenomena Pertarungan Kubu Reformis Dan Konservatif*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), h.23.

<sup>15</sup> Lihat, Ja'far Al-Sagoff, *Ayatullah Khamenei: Biografi*, (Kuala Lumpur: Penerbit University Kuala Lumpur, 1989), h. 37.

Konflik yang terjadi dalam hubungan luar negeri Republik Islam Iran terhadap Gedung Putih hingga sekarang, diantaranya disebabkan oleh adanya *sentimen* negatif pemimpin Amerika Serikat terhadap pola pemerintahan gaya kepemimpinan *Mullah* yang cenderung fundamental memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam dan dipandang sebagai negara yang tidak demokratis. Namun Iran tetap tidak peduli dengan kritikan tersebut, melainkan tetap teguh dengan sikapnya yang cenderung menjaga jarak dengan kepentingan negeri Paman Sam tersebut sekaligus berusaha mengmbangi kekuatan diplomasi Amerika Serikat dalam kancah politik International.<sup>16</sup> Pada dasarnya usaha ini dilakukan sebagai bagian untuk mengaplikasikan kebijakan luar negeri Republik Islam Iran sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi negara yang terkait dengan politik luar negeri Republik Islam Iran pada bab sepuluh pasal 125 UUD Republik Islam Iran, menyebutkan bahwasannya kebijakan politik luar negeri Republik Islam Iran didasarkan pada penolakan segala bentuk dominasi atau penyerahan kepadanya, mempertahankan hak-hak seluruh umat Islam serta tridak memihak kepada kekuasaan seluruh umat Islam seta tidak memihak kepada kekuasaan yang mendominasi dan menjalin hubungan-hubungan damai yang timbal balik dengan negara-negara yang tidak bermusuhan. Prinsip inilah yang kemudian menjadi asas dalam setiap hubungan internasional dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Sampai kapanpun Republik Islam Iran akan tetap konsisten menjadi sebuah negara yang dengan sangat lantang menolak segala bentuk intervensi dan dominasi negara adidaya. Tidak sampai disitu saja, kepemimpinan politik dan religi negeri ini dianggap mampu memberikan harapan dan kepastian yang lebih baik bagi kehidupan masyarakatnya. Kecintaan masyarakat negeri *Mullah* ini kepada pemimpinnya merupakan modal utama bagi kesinambungan eksistensi revolusi Islam dan republik muda tersebut.

Mengapa ketidak-sukaan *Ayatollah* Khamenei berarti kebencian masyarakat Iran dan kesukaan *Ayatollah* Khamenei berarati kecintaan masyarakat Iran? Bagi mayoritas masyarakat Iran ketaatan kepada pemimpin mereka merupakan bukti cinta dan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Masyarakat Iran merupakan masyarakat yang religius, dimana doktrin revolusioner teologi Syi'ah sebagai landasan akidah mereka dan revolusi sebagai tradisi kehidupan mereka. Masyarakat Iran adalah orang-orang yang rela

---

<sup>16</sup> Abdul Choliq Wijaya, "Iran Siap menghadapi Serangan Amerika Serikat", *Pikiran Rakyat*, 03 Februari 2005, h.4.

mengorbankan nyawa mereka demi membela dan mempertahankan agama mereka, sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang Barat dan mereka yang selalu berpikir secara rasional dan ilmiah.

Aplikasi atas konsep pemerintahan Republik Islam Iran yang memadukan unsur demokrasi dan teokrasi tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemilu secara konstitusional dan terbatas disetiap lembaga tinggi negara. Adanya mekanisme dewan perwakilan di parlemen, distribusi kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dan yang paling penting adalah adanya kebebasan pers yang terbuka dan bertanggung jawab dinegeri *Mullah* tersebut. Sementara itu *embrio* atas sistem teokrasi dalam Republik Islam Iran kita temukan pada konsep teologi Syi'ah yang menjadi agama resmi negara, dimana dalam hal keyakinan terhadap kepemimpinan (*Imamah*), yaitu kepercayaan akan adanya personifikasi *Imamah* dalam seorang iman yang masih satu keturunan dan dipercaya memiliki kesucian serta diyakini terlepas dari dosa dan salah (*infalibilitas*) seperti layaknya Nabi Muhammad SAW, namun esensinya mereka bukan Nabi. Maka ketika Imam ke-12 berada dalam masa kegaiban yang besar, secara otomatis *Wilayah Imamiyah* berada para *Faqih* yang telah memenuhi syarat tertentu, yang kemudian di representasikan menjadi wakil Imam Mahdi dimuka bumi dan memiliki otoritas yang hampir sama dengan para Imam dan tentu saja dengan batasan-batasan tertentu.

Salahsatu diantara banyaknya hak dan otoritas itu adalah otoritas *Faqih* dalam bidang politik yang kemudian dikenal dengan sebutan *Wilayatul Faqih*. Konsep politik ulama ini kemudian terlembaga dan memainkan peran yang sangat penting didalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang berlangsung hingga saat ini. Namun bukan berarti kekuasaan sepenuhnya berada ditangan para ulama atau *Faqih*, sistem pemerintahan negara ini menjunjung tinggi konstitusi syariah Islam didalam proses dan aplikasi kebijakan para lembaga tinggi negara didalam menjalankan fungsi kekuasaannya. Artinya aplikasi konsep teo-demokrasi (*Mardum Salary beh Idhafe-e Dini*) seperti ini sangat melarang kekuasaan tanpa batas serta menjauhkan segala macam bentuk penyelewengan atas nama agama yang cenderung dipaksakan kepada rakyat.<sup>17</sup> Siapapun

---

<sup>17</sup> Teokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mengakui legalitas kedaulatan ada di tangan Tuhan, dimana biasanya mekanisme pemerintahannya dipegang dan direpresentasikan oleh para

yang memerintah ataupun berkuasa baik sebagai *Wali Faqih* dalam pemerintahan, Presiden, Menteri, Majelis Parlemen dan sebagainya, mereka harus tunduk dan patuh pada konstitusi yang telah disepakati secara bersama-sama. Kedaulatan tertinggi negeri revolusi ini berada dalam genggaman Tuhan yang representasikan melalui Al Qur'an dan Al Hadist, bukan pada suatu lembaga atau figur seseorang. Maka secara otomatis produk-produk hukum dan undang-undang yang telah diputuskan dan disepakati tersebut harus bersandar pada nash-nash Al Qur'an dan Al Hadist.

## PENUTUP

Republik Islam Iran adalah sebuah negara yang menjadikan “Islam” sebagai pandangan hidup (*way of life*) yang kemudian diaplikasikan ke dalam sistem politik, sosial dan budaya masyarakatnya. Negara yang sebelumnya berbentuk monarki di bawah pimpinan dinasti Pahlevi (1929-1979 M), kini berubah menjadi negara yang mampu mensinergikan konsep sistem politik teokrasi dan demokrasi dalam tatanan aplikasi pemerintahannya yang kemudian dikenal dengan istilah Teo-Demokrasi. Perubahan bentuk negara Persia ini tidak terlepas dari keberhasilan Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang di gagas oleh Imam Khomeini. Keberhasilan Revolusi Islam Iran pada dasarnya adalah sebuah *kulminasi* atas ketidakpuasan berbagai elemen masyarakat Iran saat itu terhadap kebijakan Syah Pahlevi disemua bidang kehidupan. Bangkitnya sejumlah kepentingan yang mendasar antara masyarakat dan ulama yang kemudian membentuk aliansi politik diantara kekuatan-kekuatan oposisi yang berlainan ideologi, hal inilah yang kemudian memunculkan “revolusi rakyat” sebagai pemersatu, dengan membawa agenda “Islam” ke dalam situasi revolusioner yang kemudian diartikulasikan sebagai sistem nilai perjuangan selanjutnya. Konsep agama inilah yang kemudian menjadi ruh dan semangat Revolusi Islam Iran, yaitu faktor keimanan dan keyakinan akan hadirnya Imam Mahdi sang juru selamat dan pemimpin negara atas kaum lemah

---

ulama atau ruhaniawan. Sementara demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang bersumber dari dan untuk rakyat. Teo-Demokrasi menggabungkan antara keduanya dimana para ulama dan rakyat memiliki legalitas kedaulatan yang hampir seimbang.

(*Mustad'afin*) yang senantiasa membela dan menegakkan keadilan serta melawan penindasan terhadap kaum yang zalim (*Mustakbirin*).

## REFERENSI

### Buku-buku

- Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1981.
- Abidin, Ali Zaenal. *Identitas Mazhab Syi'ah : Melacak Akar Historis Kelahiran Ajaran dan Dasar-Dasarnya*. Jakarta : Ihya Press, 2004.
- Amili, Muhammad Hassan. *Wasailus Syi'ah*. Beirut : Dar Ihya Turats Arabi, 1965.
- Amuli, Javadi. *Velayat-e Faqih : Velayat-e Fuqahast va Adalat*. Qum : Markez-e Nasr-e-e Esra, 2003.
- Anshari, Hamid. *The Narrative of Awakening : A Look at Imam Khomeini's Ideal Scientific and Political Biography ( From Birth to Ascension )*. Teheran : International Affairs Departement og The Institute for Complications and Publications of the works Imam Khomeini, 1990.
- As, Idrus, ed. *Sayyid Ali Khamenei : Akar keimanan*, Jakarta : Risalah Masa, 1989.
- Cottam, Richard. " *Inside Revolutionary Iran* ". In R. K. Ramzani, ed. *Iran's Revolution : The search for Consensus*. Bloomington : Indiana University Press, 1990.
- Cipto, Bambang. *Dinamika Politik Iran : Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Esposito, Jhon L. *Ancaman Islam : Mitos atau Realitas ? terj* . Bandung : Mizan, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Oxford : Dunia Islam Modern, terj*. Bandung : Mizan, 2001.
- \_\_\_\_\_, Vool, Jhon O. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim, terj* . Bandung : Mizan, 1999.
- Faramazi, M T. *A Travel Guide to Iran*. Teheran : Fatahi, 1995.
- Goldberg, Jacob. " *The Shili Minority in Saudi Arabia* ". In Juan R. I. Cole and Nikki R.
- Keddie, ed. *Shiism and Social Protest*. New Heaven conn : Yale University Press, 1986.
- Gottscahalk, Louis. *Mengerti Sejarah, terj* . Jakarta : UI Press, 1985.
- Habsyi, Ibrahim. *Ahlul Bait : Nama-Nama Yang Terlupakan*. Teheran : Penerbit Organisasi Budaya dan Komunikasi RII, 1997.
- Haidar, Syed Afzal. *Velayat-e-Faqih Imam Khomeini and Islamic Revolution*. Lahore : Gautam Publisher, 1996.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1983.
- Hashem, O. *Saqifah Awal Perselisihan Umat*. Jakarta : Penerbit Al Munyazhar, 1994
- Hassan, Sayyid Abu. *Puncak Kefasihan, terj*. Jakarta : Penerbit Lentera, 1999.
- Husaini, Sayyid Hussain. *Velayat-e-Faqih dar Hukumat-e-Islami*. Masyhad : Intisyarat-e-Allamah Tabatabai, 1999.
- Iranian Embassy of Jakarta. *The Constitution of The Islamic Republik of Iran*. Teheran : Ministry of Foreign Islamic Republik of Iran, 1990.
- Imani, Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an. Terj*. Jakarta : Al Huda, 2005.
- Kazim, Musa, ed. *Wilayatul Faqih*, Qum : Penerbit HPI, 2001.

- Khamenei, Ali. *Perang Kebudayaan, terj.* Jakarta : Penerbit Cahaya, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Speeches and Viewpoints*. Teheran : The Iranian Journal of International Affairs, Vol. IX, 1997-1998.
- \_\_\_\_\_. *Fatwa-Fatwa, terj.* Jakarta : Al Huda, 2005.
- Khatami, Ahmad. *Membangun Dialog Antar Peradaban : Harapan dan Tantangan*, terj. Bandung : Mizan, 1998.
- Khomeini, Imam. *Velayat-e-Faqih va Hukumat-e-Islami*. Qum : Mussese-e-va Atsar-e Imam Khomeini, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Shahife-e-Nur*. Teheran : International Affairs Departement of The Institute for Compilcation and Publications of The Works Imam Khomeini, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Pemeritahan Islam, terj.* Jakarta : Pustaka Az Zahra, 1998.
- Kulayni, Muhammad Ya'qub. *Al-Ushul Al-Kafi*. Teheran : Dar Al Uswah, 1961.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 2003.
- Lari, Sayyid Mujtaba. *Teologi Islam Syi'ah, terj.* Jakarta : Al Huda, 2004.
- Lotfian, Saideh. *Iran's Middle East Policies Under President Khatami*. Teheran : The Iranian Journal of International Affairs. Vol. X, 1998-1999.
- Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam As-Sultoniyyah*. Beirut: Dar El Fikr, tt.
- Mududi, Abu A'la. *Teori Politik Islam, terj.* Bandung : Mizan, 1995.
- Milani, M Mohsen. " *Reform and Resistence In The Islamic Republik of Iran* ". In Jhon L Esposito and R. K. Ramzani, ed. *Iran at The Crossroads*. New York : PALGRAVE, 2000.
- Muhajeri, Masih. *Islamic Revolution Future Paith of The Nations*. Teheran : Jihad-e Sazandegi Publisher, 1983.
- Muntaziri, Ali. *Mbaani-e-Fuqaha va Hukumat-e-Islami*. Qum : Intisyarat-e- Kayhan, 1989.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Organisasi Negara menurut Islam*. Banda Aceh : Indo bakti Press, 1988.
- Musawi, Sayyid Muhammad. *Mazhab Syi'ah : Dalam Kajian Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Bandung : Muntahari Press, 2005.
- Mutahari, Murthada. *Vala va Vilayatha*. Qum : Intrisyarat-e-Sadra, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Masyarakat dan Sejarah, terj.* Bandung : Mizan, 1986.
- Nawawi, Imam Zakaria. *Riyadhus Shalihih*. Beirut : Darul Kitab, tt.
- Notosusanto, Nugroho. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta : Idayu Press, 1984.
- Qardhawy, Yusuf. *Fiqh Negara, terj.* Jakarta : Rabbani Press, 1997.
- Rahman, Musthofa Abdul. *Iran Pasca Revolusi : Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*, Jakarta : Kompas, 2003.
- Rahmat, Jalaludin. *Pemikiran Politik Islam, dari Nabi Muhammad SAW via Al Farabi Hingga Ayatullah Khomeini*. Dalam Yamani. : *Filsafat Politik Islam*. Bandung : Mizan, 2002.
- Rahnema, Ali, ed. *Para Perintis Zaman Baru Islam, terj.* Bandung : Mizan, 1995.
- Rais, Dhiauddin. *Teori Politik Islam, terj.* Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Sadry, Hussain Ghulam, ed. *Farhang Farsi Imruz*. Teheran : Kalam-e-Publisher, 2000.
- Sagiff, Ja'far. *Ayatullah Khamenei : Biografi*. Kuala Lumpur : Penerbit University Kuala Lumpur, 1989.
- Sihbudi, Reza. *Otobiografi Politik Imam Khomeini*. Jakarta : Gramedia, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Profil Negara-Negara Timur-Tengah*, Jakarta : Puataka Jaya, 1995.
- Sjazali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta : UI Press, 1993.

- Sulaiman, D Y, ed. *Demokrasi Tangan Tuhan*, Qum : Penerbit HPI, 2001.  
Tamara, Naasir. *Revolusi Iran*. Jakarta : Sinar Harapan, 1980.  
Teherani, Hadavi Mehdi. *Negara Ilahiah, terj.* Jakarta : Al Huda, 2002.  
Wijaya, Abdul Chaliq, “ Iran Siap Menghadapi Serangan Amerika Serikat “, *Pikiran Rakyat*. 03 Februari 2005, h.4.  
Yamani. *Filsafat Politik Islam*. Bandung : Mizan, 2006.  
Zadeh, Hussain Muhammad. *Omuzes-e-Ahkam*. Qum : Markaz Jahane Ulume Islaami, 1999.

**Website**

<http://www.apostateislam.com>

<http://www.en.wikipedia.org/wiki/alikamenei>

<http://www.globalsecurity.org/military/world/iran/khamenei/htm>

<http://www.Pbs.org/newshour/middle-east/iran/leader-khamenei/html>

<http://www.news.bbc.co.uk/hi/middle-east/htm>

<http://www.khamenei.ir>.